

Pelaksanaan Kepemimpinan Oleh Kepala Pelaksana Dalam Upaya Mencapai Efektivitas Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka

Firdan Octafryadiansyah
Universitas Majalengka, Majalengka
firdanoctafy@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted at the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Majalengka Regency. The results show that the effectiveness of disaster management at BPBD has not been fully effective. Several indicators supporting this finding include the slow dissemination of disaster prevention and preparedness information to the public, as well as delays in the distribution of logistics to disaster-affected areas. This is due to the inadequate application of leadership techniques by the Head of Operations, including a lack of direction for employees and limited work facilities required for disaster management. This study used descriptive analysis with a population of 76 BPBD employees, utilizing the Total Sampling technique. Data collection methods included literature review, observation, interviews, and questionnaires. To measure leadership variables, parameters from Pamudji's leadership techniques were used, while for public service effectiveness, Lubis' parameters were applied. The study's findings revealed that the leadership performance of the Head of Operations scored 68.20% with a "Fairly Good" rating. This condition affected the effectiveness of disaster management, which scored 68.75%, also rated as "Fairly Good." The relationship between leadership and disaster management effectiveness is causal, where the success of disaster management effectiveness heavily depends on the proper application of leadership techniques by the Head of Operations.

Keywords: Disaster management effectiveness, Leadership, BPBD Majalengka Regency, Leadership techniques, Public outreach and logistics.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penanggulangan bencana di BPBD belum sepenuhnya efektif. Beberapa indikator yang mendukung temuan ini adalah lambatnya sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat, serta lambatnya pendistribusian logistik ke daerah bencana. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penerapan teknik kepemimpinan oleh Kepala Pelaksana, termasuk minimnya arahan terhadap pegawai dan terbatasnya fasilitas kerja yang diperlukan dalam penanggulangan bencana. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan populasi 76 pegawai BPBD, menggunakan teknik Total Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan angket. Untuk mengukur variabel kepemimpinan, digunakan parameter teknik kepemimpinan dari Pamudji, sementara untuk efektivitas pelayanan publik digunakan parameter dari Lubis. Hasil rekapitulasi penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kepemimpinan Kepala Pelaksana memperoleh nilai 68,20% dengan predikat "Cukup Baik." Kondisi ini berdampak pada efektivitas penanggulangan bencana yang mendapatkan nilai 68,75% dengan predikat "Cukup Baik." Hubungan antara kepemimpinan dan efektivitas penanggulangan bencana bersifat sebab akibat, di mana keberhasilan efektivitas penanggulangan bencana sangat bergantung pada penerapan teknik kepemimpinan yang baik oleh Kepala Pelaksana.

Kata Kunci: Efektivitas penanggulangan bencana, Kepemimpinan, BPBD Kabupaten Majalengka, Teknik kepemimpinan, Sosialisasi dan logistik

Korespondensi: Firdan Octafryadiansyah. Prodi Administrasi Publik FISIP Universitas Majalengka, Majalengka 45418

No. HP, WhatsApp: 081345123 Email: firdanocto@gmail.com

Submitted: Juli 2024 | Accepted: Agustus 2024 | Published: September 2024

E-ISSN | Website: <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jumash/>

PENDAHULUAN

Diketahui bahwa berdasarkan hasil kajian Indeks Resiko Bencana Indonesia IRBI Tahun 2021 Jawa Barat berada di peringkat 9 (Sembilan) dengan Skor 134,94 statusnya (kelas resiko), turun dari tahun sebelumnya tahun 2020 dengan skor 145,81. Adapun di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Indeks Resiko Bencana pada tahun 2021 berada di peringkat 347 dengan skor 124,74 dengan status sedang (kelas risiko), turun dari tahun sebelumnya tahun 2020 dengan skor 143,43 dengan status sedang (kelas risiko). Sedangkan di Kabupaten Majalengka sepanjang tahun 2022 ini sudah lebih dari 200 (dua ratus) kejadian tercatat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka dengan jenis bencana yang bervariasi mulai dari bencana banjir, tanah longsor, gerakan tanah, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan dan bencana lainnya. (Profil BPBD Kabupaten Majalengka, 2022).

Sedangkan menurut data dari PUSDALOPS-PB (Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka selama Tahun 2022 sudah terjadi 269 kejadian. Berdasarkan data tersebut maka hampir seluruh jenis bencana dan hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Majalengka terdampak bencana meskipun intensitas bencana tidak masif, akan tetapi kita harus tetap waspada karena bencana akan datang kapanpun dan dimanapun. Atas dasar tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 Dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka (BPBD) sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang penanggulangan bencana.

Dengan telah dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka, diharapkan penanggulangan bencana mulai dari pencegahan kesiapsiagaan, kedaruratan logistik dan rehabilitasi rekonstruksi dapat terkoordinasi dengan baik melalui prinsip-prinsip kesiapan, kecepatan, ketepatan dibawah satu komando yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka.

Guna menjamin pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PELAKSANAAN KEPEMIMPINAN OLEH KEPALA PELAKSANA DALAM UPAYA MENCAPAI
EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN ngan
BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN MAJALENGKA
(FIRDAN OCTAFRYADIANSYAH)

bencana, diperlukan adanya kepemimpinan yang efektif dari seorang pemimpin agar para pegawai bisa menjalankan pekerjaan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dimana kepemimpinan dalam setiap organisasi selalu ditentukan oleh kemampuan seorang pemimpin dalam menjalankan fungsinya sebagai pengarah dan pengawas kegiatan bawahannya. Tanpa ditunjang oleh kemampuan kepemimpinan yang memadai, maka optimalisasi dari tujuan organisasi tidak akan tercapai.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui pelaksanaan kepemimpinan Kepala Pelaksana dalam upaya mencapai efektivitas penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka. 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kepemimpinan Kepala Pelaksana dalam upaya mencapai efektivitas penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan **metode deskriptif analisis**, yaitu metode penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau fenomena secara faktual atau berdasarkan fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan yang ada pada saat penelitian/pengamatan berlangsung. selanjutnya data hasil penelitian ini dianalisa lebih lanjut sebagai bahan untuk menarik kesimpulan.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1) Studi Kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan tertulis berupa dokumen, peraturan-peraturan dan teori-teori dengan tujuan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan sasaran penelitian. 2) Studi Lapangan, meliputi:

- a. Wawancara berstruktur, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terpadu secara langsung kepada responden dalam hal ini Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka.
- b. Observasi non Partisipan, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian tanpa melibatkan diri kepada kegiatan yang sedang berlangsung dengan maksud untuk mengetahui selengkap mungkin mengenai permasalahan yang terdapat dalam obyek penelitian.

- c. Angket, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya kepada responden yaitu Pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dalam pengolahan data, penulis menggunakan cara sebagai berikut:

1. Editing atau verifikasi

Setelah angket diisi oleh responden dan dikembalikan kepada penulis, penulis segera memeriksa kelengkapan dalam mengisi angket, bila angket tidak/kurang lengkap dijawab peneliti segera menghubungi responden untuk memohon untuk melengkapinya.

2. Tabulating

Langkah kedua adalah pengolahan data dengan memindahkan jawaban dari angket ke dalam tabulasi atau tabel. Kemudian setelah data diolah sehingga angket dinyatakan sah, maka selanjutnya melakukan analisa dengan teknik deskriptif dengan prosentase.

3. Analizing

Langkah ini adalah menganalisa data yang telah diolah secara verbal sehingga hasil penelitian mudah dipahami.

4. Concloding

Langkah ini adalah memberikan kesimpulan dari hasil analisa dan intepretasi data.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, yaitu data kualitatif yang diubah menjadi data kuantitatif, maka digunakan data analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya prosentase jawaban angket dari responden.

Rumus yang digunakan adalah:

$$p = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = angka prosentase

F= Frekuensi (jawaban responden)

N=Number of cases (jumlah responden)

Untuk mengetahui kategori penilaian atas akumulasi persentasi yang didapat digunakan standar penilaian menurut pendapat Suharsimi Arikunto dalam bukunya “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”, yaitu:

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Analisa Data

No.	Interval	Predikat
1 .	76% - 100%	Baik
2.	56% - 75%	Cukup baik
3.	40% - 55%	Kurang baik
4.	< 40%	Tidak baik

Sumber: Arikunto (2017: 49)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Organisasi sebagai wadah dalam memenuhi setiap keinginan manusia dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan memerlukan penggerakan oleh pemimpin agar hasil dari pelaksanaan kerja yang dilakukan bawahan mencapai hasil yang optimal.

Dalam rangka meneliti tentang pelaksanaan kepemimpinan oleh Kepala Pelaksana dalam upaya mencapai efektivitas penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka, maka penulis menetapkan populasi sebanyak 76 orang responden (tidak termasuk Kepala Pelaksana) untuk diberikan angket.

Angket yang disebar oleh penulis menyangkut pelaksanaan kepemimpinan oleh Kepala Pelaksana yang didasarkan pada teknik-teknik kepemimpinan sebagaimana dikemukakan oleh S. Pamudji dalam bukunya “Kepemimpinan Pemerintah di Indonesia”, yaitu sebagai berikut :

- 1) Teknik pematangan dan penyiapan pengikut
- 2) Teknik *human relations*
- 3) Teknik menjadi teladan
- 4) Teknik persuasi dan pemberian perintah
- 5) Teknik penggunaan sistem komunikasi yang cocok
- 6) Teknik penyediaan fasilitas

Selanjutnya penulis akan membahas hasil penelitian mengenai kepemimpinan Kepala Pelaksana dalam upaya mencapai Efektivitas penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka, ditinjau dari setiap penerapan teknik kepemimpinan tersebut di atas :

1. Teknik Pematangan dan Penyiapan Pengikut

Keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi, sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam melakukan pematangan dan penyiapan pengikut, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan para pegawai/bawahan dapat mengikuti keinginan pimpinan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Demikian pula pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka, tercapainya Efektivitas penanggulangan bencana sangat ditentukan oleh kemampuan Kepala Pelaksana dalam pematangan dan penyiapan pengikut, sehingga pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya senantiasa mengarah pada pencapaian Efektivitas penanggulangan bencana.

Untuk mengetahui tentang upaya Kepala Pelaksana dalam penerapan teknik pematangan dan penyiapan pengikut, maka penulis melakukan penelitian terhadap tiga indikator dari teknik kepemimpinan tersebut sebagai berikut :

a) Pengarahan dan bimbingan

Untuk meningkatkan pemahaman bawahan terhadap tugas dan fungsinya diperlukan pengarahan dan bimbingan seorang pemimpin. Demikian pula Kepala Pelaksana hendaknya berusaha untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada seluruh pegawai, sehingga pegawai dapat memahami tentang tugas serta fungsinya dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, dalam melaksanakan pekerjaannya setiap pegawai senantiasa sesuai dengan tugas serta fungsi yang telah ditentukan.

b) Kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan

Pendidikan dan latihan bagi seorang pegawai bertujuan untuk meningkatkan kecakapan dan kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tugasnya. Jika Kepala Pelaksana dalam kepemimpinannya berusaha untuk mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan latihan tentunya hal tersebut dapat meningkatkan kecakapan dan kemampuan pegawai yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pencapaian Efektivitas penanggulangan bencana.

c) Partisipasi pegawai dalam proses pengambilan keputusan

Terwujudnya kepatuhan, ketaatan dan tanggungjawab pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan, yaitu sesuai dengan kebijakan maupun rencana yang telah ditetapkan, sangat ditentukan oleh kemampuan Kepala Pelaksana dalam menumbuhkan partisipasi pegawai dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan agar pegawai merasa turut bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui tentang upaya Kepala Pelaksana dalam penerapan teknik pematangan dan penyiapan pengikut, maka dapat dilihat dari tanggapan responden terhadap tiga indikator dari teknik kepemimpinan tersebut, seperti yang tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.6 : Tanggapan Responden Terhadap Upaya Kepala Pelaksana Dalam Menerapkan Teknik Pematangan Dan Penyiapan Pengikut.

No	Indikator pertanyaan	Katagori								Jumlah	
		Selalu		Sering		Jarang		Tdk Pernah			
		f	%	f	%	f	%	f	%	F	%
1	Pengarahan dan bimbingan	55	72,37	7	9,21	8	10,53	6	7,89	76	100
2	Kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan	53	69,74	6	7,89	9	11,84	8	10,53	76	100
3.	Partisipasi Pegawai	54	71,05	8	10,53	12	15,79	2	2,63	76	100

(N = 76)

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2023

Berdasarkan tanggapan responden pada tabel tersebut di atas, dapat diketahui tentang upaya Kepala Pelaksana dalam penerapan teknik pematangan dan penyiapan pengikut, yaitu sebagai berikut :

1) Pengarahan dan Bimbingan

Sebanyak 55 responden (72,37%) menyatakan bahwa dalam kepemimpinannya, Kepala Pelaksana selalu berusaha memberikan pengarahan dan bimbingan, sedangkan 7 responden (9,21%) menyatakan bahwa Kepala Pelaksana sering berusaha memberikan pengarahan dan bimbingan sebanyak 8 responden (10,53%) menyatakan bahwa Kepala Pelaksana jarang memberikan pengarahan dan bimbingan dan sebanyak 6 responden (7,89%) menyatakan bahwa Kepala Pelaksana tidak berusaha memberikan pengarahan dan bimbingan

Dari tanggapan responden tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam kepemimpinannya Kepala Pelaksana telah melakukan pemberian bimbingan dan pengarahan dengan cukup baik yaitu mencapai 72,37%. Hal ini jelas akan berpengaruh terhadap efektivitas penanggulangan bencana, karena Pegawai akan memahami tugas serta fungsinya dalam melaksanakan pekerjaannya.

Melalui wawancara dengan Kepala Pelaksana diperoleh keterangan bahwa untuk menciptakan pegawai yang mampu memahami tugas dan fungsinya, antara lain dilakukan dengan memberikan pengarahan dan bimbingan mengenai pentingnya pelaksanaan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pegawai pada dasarnya telah memahami tentang tugas dan fungsinya. Hal ini terlihat dari adanya usaha untuk memperhatikan tentang prosedur kerja dalam memberikan pelayanan publik, walaupun belum seluruhnya dilaksanakan, misalnya masih adanya Pegawai yang belum begitu tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa.

2) Kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan

Sebanyak 53 responden (69,74%) menyatakan bahwa dalam kepemimpinannya Kepala Pelaksana selalu berusaha memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan, sedangkan 6 responden (7,89%) menyatakan bahwa Kepala Pelaksana sering berusaha memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan dan sebanyak 9 responden (11,84%) menyatakan bahwa Kepala Pelaksana jarang berusaha memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan

dan latihan dan sisanya sebanyak 8 responden (10,53%) menyatakan bahwa Kepala Pelaksana tidak berusaha memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan.

Dari tanggapan responden tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam kepemimpinannya ternyata Kepala Pelaksana belum optimal namun sudah cukup baik berusaha untuk memberikan kesempatan bagi pegawai dalam mengikuti pendidikan dan latihan. yaitu baru mencapai 69,74% Hal ini jelas akan menjadi penunjang dalam peningkatan pengetahuan serta kecakapan pegawai, yang pada akhirnya mendorong pencapaian Efektivitas penanggulangan bencana.

Melalui wawancara diperoleh keterangan bahwa untuk mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan latihan Kepala Pelaksana terus memotivasi para pegawainya untuk mengikuti pendidikan dan latihan terutama memberikan kesempatan izin belajar untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil observasi, terlihat bahwa masih terdapat sebagian pegawai yang cukup mampu dalam pelaksanaan tugasnya, misalnya dalam memberikan pelayanan uji kelayakan kendaraan, meskipun bahwa dalam tingkat kecakapan serta pengetahuan pegawai masih perlu ditingkatkan.

3) Partisipasi pegawai dalam proses pengambilan keputusan

Sebanyak 54 responden (71,05%) menyatakan bahwa dalam kepemimpinannya, Kepala Pelaksana selalu berusaha menumbuhkan partisipasi pegawai, sedangkan 8 responden (10,53%) responden menyatakan bahwa Kepala Pelaksana sering berusaha menumbuhkan partisipasi pegawai, dan Sebanyak 12 responden (15,79%) menyatakan bahwa Kepala Pelaksana jarang berusaha menumbuhkan partisipasi pegawai dan sisanya sebanyak 2 responden (2,63%) menyatakan bahwa Kepala Pelaksana tidak berusaha menumbuhkan partisipasi pegawai.

Dari tanggapan responden tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam kepemimpinannya Kepala Pelaksana sudah cukup baik berusaha menumbuhkan partisipasi pegawai dalam proses pengambilan keputusan yaitu mencapai sebesar 71,05%, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan yang didasarkan pada keputusan yang telah dibuat, dan hanya 1 responden saja yang menyatakan jarang atau tidak pernah Kepala Pelaksana menumbuhkan partisipasi pegawai. Hal ini jelas akan berpengaruh terhadap tercapainya Efektivitas penanggulangan bencana.

Untuk mengetahui tentang upaya Kepala Pelaksana dalam penerapan teknik *Human Relations*, maka dapat diketahui melalui tanggapan responden terhadap tiga indikator dari teknik kepemimpinan tersebut, seperti yang tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.7 : Tanggapan Responden Terhadap Upaya Kepala Pelaksana
Dalam Menerapkan Teknik *Human Relations*
(N = 76)

No	Indikator pertanyaan	Katagori								Jumlah	
		Selalu		Sering		Jarang		Tdk Pernah			
		f	%	f	%	f	%	f	%	F	%
1.	Kebutuhan akan kelayakan	53	69,74	11	14,47	7	9,21	5	6,58	76	100
2.	Kebutuhan akan penghargaan	52	68,42	8	10,53	10	13,16	6	7,89	76	100
3.	Kebutuhan akan keamanan dan ketertiban	53	69,74	12	15,79	7	9,21	4	5,26	76	100

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2023

Berdasarkan tanggapan responden pada tabel tersebut di atas, dapat diketahui tentang upaya Kepala Pelaksana dalam penerapan teknik *Human Relations*, yaitu sebagai berikut:

1) Kebutuhan akan kelayakan

Sebanyak 53 responden (69,74%) menyatakan bahwa dalam kepemimpinannya, Kepala Pelaksana selalu berusaha memperhatikan kebutuhan akan kelayakan, sedangkan 11 responden (14,47%) menyatakan bahwa Kepala

Pelaksana sering berusaha memperhatikan kebutuhan akan kelayakan, sebanyak 7 responden (9,21%) menyatakan bahwa Kepala Pelaksana jarang memperhatikan kebutuhan akan kelayakan. dan sisanya sebanyak 5 responden (6,58%) menyatakan bahwa Kepala Pelaksana tidak berusaha memperhatikan kebutuhan akan kelayakan

Untuk mengetahui tentang upaya Kepala Pelaksana dalam penerapan teknik menjadi teladan, maka dapat diketahui melalui tanggapan responden terhadap tiga indikator dari teknik kepemimpinan tersebut, seperti yang tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.8 : Tanggapan Responden Terhadap Upaya Kepala Pelaksana
 Dalam Menerapkan Teknik Menjadi Teladan
 (N = 76)

No	Indikator pertanyaan	Katagori								Jumlah	
		Selalu		Sering		Jarang		Tdk Pernah			
		f	%	f	%	f	%	F	%	F	%
1.	Kedisiplinan	57	75,00	13	17,11	4	5,26	2	2,63	76	100
2.	Pemberian Contoh	55	72,37	9	11,84	9	11,84	3	3,95	76	100
3.	Pelaksanaan Kebijakan	56	73,68	8	10,53	9	11,84	3	3,95	76	100

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2023

Berdasarkan tanggapan responden pada tabel tersebut di atas, dapat diketahui tentang upaya Kepala Pelaksana dalam penerapan teknik menjadi teladan, yaitu sebagai berikut :

1) Kedisiplinan

Sebanyak 57 responden (75,00%) menyatakan bahwa dalam kepemimpinannya, Kepala Pelaksana selalu berusaha memberikan keteladanan dalam

hal kedisiplinan, sedangkan 13 responden (17,11%) menyatakan bahwa Kepala Pelaksana sering memberikan keteladanan dalam hal kedisiplinan, sebanyak 4 responden (5,26%) menyatakan bahwa Kepala Pelaksana jarang memberikan keteladanan dalam hal kedisiplinan, dan sisanya sebanyak 2 responden (2,63%) menyatakan bahwa Kepala Pelaksana tidak berusaha untuk memberikan keteladanan dalam hal kedisiplinan.

Untuk mengetahui tentang upaya Kepala Pelaksana dalam penerapan teknik persuasi dan pemberian perintah, maka dapat diketahui melalui tanggapan responden terhadap tiga indikator dari teknik kepemimpinan tersebut, seperti yang tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.9 : Tanggapan Responden Terhadap Upaya Kepala Pelaksana

Dalam Menerapkan Teknik Persuasi dan Pemberian Perintah

(N = 76)

No	Indikator pertanyaan	Katagori								Jumlah	
		Selalu		Sering		Jarang		Tdk Pernah			
		f	%	f	%	f	%	f	%	F	%
1.	Kejelasan	55	72,37	5	6,58	7	9,21	9	11,84	76	100
2.	Ketepatan dalam pemberian perintah	54	71,05	7	9,21	6	7,89	9	11,84	76	100
3.	Motivasi dalam pemberian perintah	52	68,42	9	11,84	7	9,21	8	10,53	76	100

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2023

Berdasarkan tanggapan responden pada tabel tersebut di atas, dapat diketahui tentang upaya Kepala Pelaksana dalam penerapan teknik persuasi dan pemberian perintah, yaitu sebagai berikut :

1) Kejelasan

Sebanyak 55 responden (72,37%) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kepemimpinannya, Kepala Pelaksana selalu berusaha untuk memberikan perintah secara jelas, sedangkan 5 responden (6,58%) menyatakan bahwa Kepala Pelaksana sering

memberikan perintah secara jelas dan sebanyak 7 responden (9,21%) menyatakan bahwa Kepala Pelaksana jarang memberikan perintah secara jelas. sedangkan sisanya sebanyak 9 responden (11,84%) menyatakan bahwa Kepala Pelaksana tidak pernah memberikan perintah secara jelas

Untuk mengetahui tentang upaya Kepala Pelaksana dalam penerapan teknik penggunaan sistem komunikasi yang cocok, maka dapat diketahui melalui tanggapan responden terhadap tiga indikator dari teknik kepemimpinan tersebut, seperti yang tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.10 : Tanggapan Responden Terhadap Upaya Kepala Pelaksana Dalam Menerapkan Teknik Penggunaan Sistem Komunikasi yang cocok

(N = 76)

No	Indikator pertanyaan	Katagori								Jumlah	
		Selalu		Sering		Jarang		Tdk Pernah		F	%
		f	%	f	%	f	%	f	%		
1.	Komunikasi dua arah	52	68,42	5	6,58	9	11,84	8	10,53	76	100
2.	Sistem komunikasi instruksional	56	73,68	9	11,84	9	11,84	2	2,63	76	100
3.	Penyampaian tugas secara tertulis	55	72,37	7	9,21	8	10,53	6	7,89	76	100

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2023

Berdasarkan tanggapan responden pada tabel tersebut di atas, dapat diketahui tentang upaya Kepala Pelaksana dalam penerapan teknik penggunaan sistem komunikasi yang cocok, yaitu sebagai berikut:

1) Komunikasi dua arah

Sebanyak 52 responden (68,42%) menyatakan bahwa dalam kepemimpinannya, Kepala Pelaksana selalu berusaha melakukan komunikasi dua arah dengan pegawai, sedangkan 5 responden (6,58%) menyatakan bahwa Kepala Pelaksana sering melakukan komunikasi dua arah dengan pegawai dan sebanyak 9 responden (11,84%) menyatakan bahwa Kepala Pelaksana jarang melakukan komunikasi dua arah dengan pegawai. sedangkan sebanyak 8 responden (10,53%) menyatakan bahwa Kepala Pelaksana tidak melakukan komunikasi dua arah dengan pegawai.

Untuk mengetahui tentang upaya Kepala Pelaksana dalam penerapan teknik penyediaan fasilitas kerja, maka dapat diketahui melalui tanggapan responden terhadap tiga indikator dari teknik kepemimpinan tersebut, seperti yang tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel. 4.11 : Tanggapan Responden Terhadap Upaya Kepala Pelaksana Dalam Menerapkan Teknik Penyediaan Fasilitas Kerja (N = 76)

No	Indikator pertanyaan	Katagori								Jumlah	
		Selalu		Sering		Jarang		Tdk Pernah			
		f	%	f	%	f	%	f	%	F	%
1.	Kelengkapan fasilitas kerja	51	67,11	5	6,58	13	17,11	7	9,21	76	100
2.	Ketepatan penyimpanan fasilitas kerja	54	71,05	9	11,84	7	9,21	6	7,89	76	100
3.	Pemeliharaan fasilitas kerja	54	71,05	8	10,53	9	11,84	5	6,58	76	100

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2023

Berdasarkan tanggapan responden pada tabel tersebut di atas, dapat diketahui tentang upaya Kepala Pelaksana dalam penerapan teknik penyediaan fasilitas, yaitu sebagai berikut :

1) Kelengkapan fasilitas kerja.

Sebanyak 51 responden (67,11%) menyatakan bahwa dalam kepemimpinannya, Kepala Pelaksana selalu memperhatikan kelengkapan fasilitas kerja, sedangkan 5 responden (6,58%) menyatakan bahwa Kepala Pelaksana sering berusaha untuk memperhatikan kelengkapan fasilitas kerja dan sebanyak 13 responden (17,11%) menyatakan bahwa Kepala Pelaksana jarang memperhatikan kelengkapan fasilitas kerja, sisanya sebanyak 7 responden (9,21%) menyatakan bahwa Kepala Pelaksana tidak pernah memperhatikan kelengkapan fasilitas kerja.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang pelaksanaan kepemimpinan oleh Kepala Pelaksana dalam upaya mencapai efektivitas

pelayanan public pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kepala Pelaksana belum sepenuhnya melaksanakan kepemimpinan secara optimal. Hal tersebut dapat terlihat dari pelaksanaan Teknik-teknik Kepemimpinan oleh Kepala Pelaksana dengan nilai rata-rata **68,20%** baru mencapai predikat **“Cukup Baik”**. Dengan demikian Kepala Pelaksana dalam pelaksanaan kepemimpinannya masih perlu berusaha lagi dalam menerapkan teknik-teknik kepemimpinan. Belum optimalnya pelaksanaan teknik kepemimpinan oleh Kepala Pelaksana BPBD Hal ini menyebabkan Pencapaian efektivitas penanggulangan bencana baru mencapai rata-rata **68,75%** dengan predikat **“Cukup Baik”**.
2. Belum dilaksanakannya teknik-teknik kepemimpinan secara penuh, dikarenakan Kepala Pelaksana menghadapi beberapa hambatan, yaitu : Keterbatasan dana, waktu dan perhatian pimpinan serta adanya perbedaan pemahaman, kemampuan, pendidikan maupun pengetahuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Hipotesis yang penulis ajukan : “Jika pelaksanaan kepemimpinan oleh Kepala Pelaksana dilaksanakan berdasarkan Teknik-teknik Kepemimpinan, maka Efektivitas penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka. Tercapai”

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Arikunto, Suharsimi. 2017 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Putra.
- Handayani, Soewarno. 2011. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Keban, Yeremias T. 2019. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik: konsep, teori dan isu*. Yogyakarta : Gava Media.
- Kartono, Kartini. 2013. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karyadi. 2015. *Kepemimpinan (Leadership)*, Bandung: PT.Karya Nusantara.
- K. Soekarno, 2014. *Dasar-Dasar Manajemen* . Jakarta: Miswar.
- Lubis, Ibrahim. 2015. *Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Hadari. 2014. *Kepemimpinan yang Efektif*. Gajah Mada University Press.
- Pasolong, Harbani. 2019. *Teori administrasi public*. Bandung: Alfabeta.
- Pamudji, S. 2016. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Siagian, Sondang P. 2012. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- , 2013. *Peranan Staf Dalam Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung
- , 2013. *Organisasi, Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sutarto. 2011. *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- , 2011. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- The Liang Gie. 2009. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty
- Westra, Pariata. 2011. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Haji Masagung.

Dokumen-dokumen

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.
- Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.
- Profil BPBD Kabupaten Majalengka, tahun 2002